

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Etika Politik Islam Menurut Dhiyauddin Rais

Islam dalam sudut pandang teologis merupakan sebuah sistem nilai yang sifatnya *ilahiyyah*. Tetapi, apabila dipandang dari sudut pandang dalam kajian sosiologis, Islam adalah kejadian kultur, peradaban, realitas sosial, dan kehidupan manusia. Islam dan etika politik memiliki peran untuk saling mengisi. Politik dianggap sebagai bagian ibadah sehingga wajib dilakukan sesuai prinsip. Politik berkaitan dengan prinsip Islam, terutama dalam mengelola masyarakat. Dalam konsep Islam bisa dipahami jika etika politik merupakan seperangkat norma atau peraturan bernegara untuk menentapkan individu untuk berperilaku berdasarkan ketentuan Allah SWT yang relevan dengan Al-Quran. Dalam pengaplikasiannya, nilai etika merujuk pada alur kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik kehidupan secara khusus ataupun umum pada tatanan berpolitik kenegaraan. Menurut Dhiyauddin Rais dalam buku *Etika Politik* yang ditulis Jubair Situmorang, etika politik islam merupakan penentu nilai dasar dalam kehidupan etika berpolitik, adalah:

a. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Musyawarah tidak dinilai dari prosedur pengambilan keputusan, melainkan sebagai kewajiban dalam agama. Misalnya, yang dilaksanakan nabi yang dilanjutkan ke *khulafur rasyidin*.

Firman Allah SWT pada Al-Quran Q.S Al-Imran ayat 159 yang berarti:

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tuntunlah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu memanfaatkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Q.S Al Imran 3:159)⁷

Secara harfiah, musyawarah adalah lembaga untuk menukar opini, ide, gagasan, serta pemikiran saat menuntaskan perkara sebelum merogoh tindakan selanjutnya. Musyawaran dilakukan guna menemukan pendapat atau penglihatan objektif pada permasalahan akibat penentuan tindakan yang dilakukan dengan cara mutlak. Pada adat Islam diketahui sebagai penentuan tindakan dengan cara bersama-sama serta sesuai dengan voting mayoritas diklaim berdasarkan ijma. Penentuan tindakan melalui musyawarah dalam Islam berdasarkan prinsip *amar ma;ruf nahi mungkar*, yang berarti melaksanakan kebaikan beserta mencegah dalam berbuat buruk.

b. Prinsip Persamaan

Dalam prinsip persamaan, Islam tidak memperlakukan diskriminatif berdasarkan perbedaan suku, bangsa, kekayaan, status sosial, maupun atribut dunia lain. Satu - satunya hal yang membuat manusia tidak sama oleh Allah SWT adalah nilai ketakwaan seseorang. Hal ini tertuang pada Q.S Al-Hujurat ayat 13, berarti:

“Wahai manusia ! sungguh, kamu menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang

⁷ Situmorang Jubair, *Etika Politik*, (Bandung, CV Pustaka Setia, Desember 2016). Hal.58

paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (Q.S Al-Hujurat :13)⁸

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan atau menegakan keadilan, khususnya para penguasa. Islam pun memrintahkan agar manusia harus memiliki tanggung jawab, lurus, serta berperilaku berdasarkan pengawasan sosial dan tercapai keadilan serta kesesuaian dalam kehidupan, sesuai firman Allah SWT pada Q.S Al-Maidah ayat 8 berarti:

”Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah :8)⁹

d. Prinsip Kebebasan (Al –Hurriyah)

Pada ajaran Islam ada aturan kebebasan yang sebenarnya menjadi pertanggungjawaban akhir individu. Pemahaman kebebasan perlu dipandng menjadi tahap pertama atas perilaku menuju tindakan yang telah dirancang dengan rasional sesuai keperluan realitas, entah itu materi ataupun spiritual manusia. Kekebasan yang dirawat dalam kehidupan berpolitik dalam Islam adalah kebebasan untuk kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-An’am ayat 164 yang artinya:

“Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu

⁸ Ibid.,59

⁹ Ibid.,60

lah kamu kembali dan akan di beritahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.(Q.S Al-An'am :164)¹⁰

Dalam perspektif Islam, etika politik memiliki tujuan dalam mendapatkan pemerintahan bersih, efektif, afisien, dan menciptakan situasi politik yang demokratis berdasarkan rasa bertanggung jawab, sikap terbuka, cermat terhadap ide, jujur, menghormati pendapat yang berbeda, dan menjunjung tinggi HAM dalam kegiatan berbangsa serta bernegara. Pada pandangan Islam etika politik menempati posisi sebagai pengamat atau pihak yang mengarahkan agar negara memberi kepedulian tinggi dalam melayani masyarakat dan menciptakan suasana harmonis antarkekuatan sosial dan pelaku serta kepentingan kelompok demi kemajuan bangsa dan negara.

2. Etika Politik Islam Menurut Al Mawardi

Mengenai etika politik merujuk pada pendapat tokoh politik Islam, yaitu Al-Mawardi. Dengan memahami pemikiran beliau serta membaca karya berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* sebagai karya terbaiknya, tertulis ketentuan politik klasik dan kewenangan pada eranya adalah pandangan yang maju hingga sekarang. Dalam pemikirannya, pemahaman atas politik berdasarkan kerangka teori politik relevan sesuai prinsip Islam (*fiqh*), berdasarkan pemahaman materi yang dijalannya. Al-Mawardi cukup berperan saat menghimpun dasar ajaran Islam dan seluruh opini *fukaha* pendahulu, kemudian menyusun menjadi rumus sistematis dan realistis. Dari pemahamannya menjadi pegangan serta teori yang mempunyai bantuan hukum pada ajaran masyarakat Islam pada masa selanjutnya. Akan tetapi, beberapa mujtahid, beliau tidak sekadar

¹⁰ *Ibid.*,60

mengumpulkan pandangan ulama sebelumnya, tetapi menjadi kepintarannya juga berijtihad pada segala jenis perkara. Acapkali hal itu menghasilkan pendapat baru yang lebih asli, dan terkadang berlainan dengan pendapat sebelumnya.

Bahasan mengenai hubungan antara agama dan Negara merupakan bagian dari pokok pemikiran Al Mawardi. Pemikiran filsafat politik dari para tokoh Yunani kuno seperti Plato berpengaruh sangat besar bagi para tokoh Muslim yang mengemukakan idenya tentang terbentuknya Negara, dimana para filsuf Yunani sangat mengutamakan ide dan akal yang ditimbang dari sumber religius atau agama. Dalam hal ini Al Mawardi sebagai tokoh Islam justru mengambil aliran berbeda dengan para pemikir tokoh Yunani, seperti Plato. Pandangannya, kehidupan beragama tidak dapat jauh dan dipisahkan dengan negara bagaimanapun caranya.

Al Mawardi memiliki pemikiran bahwa ketika dalam proses pembentukan Negara, seluruh masyarakat atau manusia harus saling membantu dan kerja sama satu sama lain. Pasalnya, hakikat manusia sebagai makhluk sosial memerlukan satu sama lainnya pada lingkungan bermasyarakat. Terjadinya sebuah kesepakatan antarmanusia untuk membentuk suatu Negara timbul karena adanya dorongan seperti keberagaman, pendekatan bakat, kecenderungan yang alami dan sebuah kemampuan yang membuat manusia menjadi bersatu. Hal ini terjadi karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk lemah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, oleh karenanya hal tersebut agar manusia tidak berlaku sombong dan selalu bersikap saling membutuhkan. Ada enam poin menurut Al-Mawardi syarat terbentuknya sebuah negara yaitu:

- a. Poin pertama adalah agama. Sebuah dasar suatu keyakinan bahwa agama merupakan acuan dan pedoman yang paling utama yang bisa

membangkitkan kehendak dan keinginan masyarakat dan melestarikan alam. Agama sendiri berfungsi menjadi modal kekuatan yang mampu mengendalikan hawa napsu bagi seorang insan, dan juga sebagai pengontrol dan menciptakan kendali bagi setiap kemauan manusia yang sangat beraneka macam, yang pada akhirnya agama bisa menjadi sebuah pondasi yang sangat kuat bagi mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman jiwa manusia dan untuk membangun negara.

- b. Poin yang kedua adalah adanya penguasa yang karismatik. Kewibawaan dalam memimpin akan terciptanya pemimpin yang bijaksana. Karisma yang berwibawa dari seorang pemimpin akan menciptakan sebuah pemimpin yang dapat di contoh dan menjadi teladan. Kewibawaannya menjadikan dia mempunyai otoritas yang tumbuh yang menjadi pemersatu untuk setiap masukan dan aspirasi masyarakat dengan berbeda latar belakang. Seorang pemimpin yang berkuasa memiliki kharismatik akan bisa membina dan mengelola negara dan membuat sasaran yang sangat mulia dengan menjunjung tinggi nilai keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat yang di pimpin, serta dapat mempertahankan supaya agama di laksanakan sebaik mungkin serta dapat menciptakan kondisi seolah dilindungi oleh negara dari berbagai tekanan dan ancaman yang timbul di tengah masyarakat.
- c. Poin yang ketiga yaitu keadilan yang menyeluruh. Keadilan merupakan poin utama, sebab keadilan yang menyeluruh bisa menciptakan sebuah kerukunan antar masyarakat di sebuah negara, dan bisa menciptakan rasa hormat, serta kepatuhan terhadap sang pemimpin. Dengan

membuat bersikap sama terhadap masyarakat akan timbul kehidupan yang tentram serta mendorong terciptanya sebuah karya dalam menciptakan prestasi oleh masyarakat.

- d. Poin yang keempat, yaitu suatu keamanan yang sangat kuat. Dari sini akan menjamin pemberian inner peace (ketenangan dan kedamaian jiwa), menghilangkan segala kecemasan, serta memberi perlindungan pada individu yang lemah maka itu menyokong masyarakat inisiatif serta tanggap selama membentuk negara. Seandainya terbentuk perasaan nyaman dan merasa tenang, rakyat semakin inisiatif serta kreatif membangun negara sehingga akan patuh terhadap pemimpin.
- e. Poin berikutnya adalah kesuburan tanah untuk menjamin kebutuhan sumber pangan penduduk. Dengan tersedianya kepastian usaha serta menemukan kebutuhan untuk masyarakat, maka negara perlu membangun kondisi serta situasi yang kondusif untuk pengembangan usaha negara serta masyarakat. Dari usaha yang realistis ini rakyat akan hidup lebih layak serta sejahtera, dan masalah horizontal bisa selesai. Pasalnya subur tanah bisa memberikan pendapatan serta menciptakan karakter saling percaya (amanah) serta dermawan. Syarat itu merupakan realisasi serta tujuan atas persyaratan sebelumnya.
- f. Dan poin yang keenam, yaitu adanya sebuah harapan. Adanya harapan bagi keberlangsungan hidup generasi sekarang dan seterusnya sangat tergantung terhadap sistem pengaturan negara oleh pendukung serta penyelenggara negara yang relevan sesuai standar dengan

berurutan pada bagian sebelumnya. Penerus sekarang ini dan berikutnya akan mengukir sejarah maupun memperbarui kehidupan di masa yang akan datang.

Keenam sendi utama menjadi tiang pendukung dasar untuk kehidupan masyarakat serta menjadi pemahaman atas dasar pembangunan kelompok sosial. Tanpa adanya keenam sendi dasar, maka komunitas sosial akan rentan menghadapi konflik politik dan sosial yang muncul dari internal masyarakat maupun dari komunitas sosial lainnya. Dari penjelasan di atas, menjelaskan jika agama dan negara saling berkaitan secara simbiotik, memiliki hubungan secara timbal-balik serta melengkapi maupun memerlukan. Hal tersebut menandakan jika agama memerlukan negara. Sebaliknya, negara membutuhkan agama agar keduanya bersama berkembang menuju tujuan yang baik sesuai moral serta etika.¹¹ Selanjutnya mengenai salah satu aturan dasar politik dalam islam yang tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat 58-59 mencakup prinsip berikut:

- a. Menjalankan amanat, klasifikasi amanat ditentukan pada opini Al-Maraghi, pertama tanggung jawab manusia kepada sang pencipta. Kedua tanggung jawab kepada sesama, ketiga tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.
- b. Keadilan dijabarkan pada Al-Quran dengan kata - kata *al-adl al-qisth*, *al-mizan*. Adil menjelaskan jika persamaan perlakuan bagi siapapun.

¹¹*Ibid.*,

- c. Ketaatan kepada Allah SWT, Rasul, *Ulil Amri*, sebagai pemilik kepentingan. Artinya, prinsip itu terkandung unsur kesadaran menepati pemerintah atau pemimpin sesudah mentaati Allah SWT dan Rasul.
- d. Merujuk kepada Allah SWT dan Rasul jika terjadi perselisihan. Setiap perselisihan di selesaikan dengan mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Prinsip itu juga memakai musyawarah sebagai langkah membina hukum serta penentuan tindakan politik.

Dalam realitas sosial, Islam bukan sekadar doktrin yang bersifat umum, melainkan mampu menyesuaikan diri pada badan sosial yang terpengaruh situasi, dinamika ruang, serta waktu. Oleh sebab itu, konsep politik dalam Islam berdasar pada semangat keimbangan yang mengandung lima bagian utama.

Pertama, semangat keadilan berdasarkan pokok tugas suci (pesan ketuhanan, risalah) para nabi. Pada dasarnya kaitan diantara iman dengan prinsip keadilan merupakan dasar politik Islam. Kedua, toleransi diapresiasi dalam Islam sesuai proses penaklukan Kota Mekah. Walaupun banyak orang Quaraisy yang tetap kukuh meyakini agama nenek moyang, Nabi Muhammad SAW tetaplah menghargai mereka sekalipun berbeda kepercayaan maupun ideologi.

Ketiga, amanah kepada umat manusia, terutama yang berurusan terhadap kekuasaan pemerintah menjadi hal yang perlu dilakukan untuk menjaga ketertiban. Setiap bentuk kekuasaan memiliki sendi sebagai kepatuhan rakyat terhadap

penguasa di suatu wilayah. Namun, kekuasaan yang layak serta harus dilaksanakan adalah kekuasaan yang bermuara dari orang banyak dengan rasa keadilan sebagai upaya menjalankan perintah Tuhan.

Penjelasan keempat, sikap demokratis yang berasal dari musyawarah. Berdasarkan pemahaman teologis, struktur teoretis mengenai kaitan erat diantara nilai iman dengan demokrasi tercermin dari tatanan kehidupan yang berdasarkan kemanusiaan sebagai wujud kontra-sosial. Maksudnya, iman kepada Tuhan menuntut supaya segala hal yang berkaitan dengan sesama manusia dapat dituntaskan menggunakan musyawarah.

Terakhir, prinsip persamaan yang menganggap bahwa manusia berasal dari satu pencipta (Tuhan) serta satu nenek moyang (Adam dan Hawa). Penjabaran ini memperjelas bahwa teologis tentang Islam sebagai agama kemanusiaan bukan sekadar restorika semata, melainkan sebagai gagasan politik. Untuk itu, keimanan dalam agama Islam merupakan sadar penyusunan konsep etika berpolitik.

3. Pengertian Etika Politik

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti berarti *ethos*. Dalam bentuk tunggal *ethos* berarti sebagai lokasi tinggal, padang rumput, kandang, karakter, perasaan, tingkah laku, serta cara pandang manusia. Beda dengan bentuk jamak, *tha etha* artinya sebagai adat kebiasaan yang dekat dengan pemahaman budaya. Dengan demikian, pengetahuan mengenai yang sering diterapkan atau pengetahuan mengenai adat kebiasaan merupakan definisi dari etika. Definisi tersebut yang menjadi latar belakang dalam terciptanya istilah

etika yang dipopulerkan oleh Aristoteles 384-322 sebelum masehi digunakan dalam menunjukkan filsafat moral. Etika sendiri dibagi kedalam etika umum serta etika khusus. Etika umum menerangkan prinsip - prinsip dasar yang berlaku bagi setiap tindakan manusia sedangkan etika khusus menjabarkan prinsip - prinsip tersebut dalam kaitan terhadap kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya.¹² Etika secara lebih lengkap adalah ilmu yang membahas moralitas atau manusia yang berkaitannya dengan moralitas. Penyelidikan perilaku moral bisa di klasifikasikan menjadi:

1) Etika deskriptif

Etika ini mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti umum, seperti adat kebiasaan, anggapan mengenai baik serta buruk, tindakan yang di perbolehkan atau tidak diperbolehkan. Objek penyelidikannya adalah individu, dan kebudayaannya.

2) Etika normatif

Dalam hal ini seseorang dapat diungkapkan menjadi *participation approach* dikarenakan dia melibatkan diri dengan menerangkan penilaian mengenai karakter manusia. Dia tidak netral dikarenakan berhak dalam mengungkapkan ataupun menolak suatu etika tertentu.

3) Metaetika

¹² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), Hal. 8.

Awalan meta dari bahasa Yunani artinya melebihi meta etika bergerak seolah - olah pada taraf lebih tinggi dari pada perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis ataupun bahasa yang dipakai di bidang moral.¹³

Selanjutnya Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, penjabaran etika berbangsa berdasarkan Ketetapan MPRRI Nomor VI/MPR/2001 adalah:¹⁴

- a. Etika sosial serta budaya
- b. Etika politik serta pemerintahan
- c. Etika ekonomi serta bisnis
- d. Etika penegakan hukum yang berkeadilan
- e. Etika keilmuan
- f. Etika lingkungan

Definisi etika berdasarkan filsafat adalah ilmu yang mempelajari mana yang baik serta mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang bisa diingat oleh akal pikiran. Istilah etika pada kehidupan sehari - hari biasa disamakan dengan istilah budi pekerti , cara pandang, bersikap, susila, kewajiban, sopan, moral , akhlak serta lain sebagainya. Namun, sebenarnya etika serta moral adalah dua kata yang berbeda serta moral disini sama dengan akhlak. Meskipun secara konsep awal etika dan moral sama seperti menilai hubungan sesuatu yang dianggap baik

¹³ Jubair Situmorang, *Etika Politik*, (Bandung, CV Pustaka Setia, Desember 2016), Hal 24-25

¹⁴ Apeles Lexi Lonto, Theodorus Pangalila, *Etika Kewarganegaraan*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak 2016), Hal 66-77.

serta buruk. Saat penggunaan kehidupan sehari - hari diantara etika dan moral terdapat sejumlah perbedaan kecil. Moral digunakan saat tindakan yang sedang dinilai sedangkan etika digunakan dalam mengkaji sistem - sistem nilai.¹⁵

Etika pada tujuan falsafah dalam mengukur perbuatan yang baik dan buruk serta mengenal sejauh mana ide pemikiran manusia. Akan tetapi, disini etika lalu merasakan kesulitan akibat pandangan baik dan buruk dalam masing - masing golongan ataupun masyarakat mempunyai penglihatan berbeda serta sifatnya pun relatif. Adapun akhlak merupakan sifat individu, yaitu kondisi jiwa yang terlatih sehingga jiwa tersebut sudah menempel pada karakter seseorang yang membentuk perbuatan secara spontan tanpa dipikirkan ataupun dibayangi lagi. Berdasarkan opini Virginia Held pada bukunya bernama Etika Moral Pembentukan Tindakan Sosial banyak seseorang berpendapat bahwa tradisi serta agama adalah arah dalam menemukan bimbingan saat menyelesaikan masalah moral.

Menurutnya kedua bidang itu mempunyai poin terbatas akibat memandang setiap tradisi yang dijabarkan seseorang masih meragukan. Misalnya setiap tradisi membedakan diantara pria serta wanita maka hal itu dapat saja disalahartikan dimana wanita disini sudah menghina kaum wanita ataupun bisa dibilang tradisi bersifat selektif. Walaupun semisal berdasarkan pada agama sebagai sumber nilai suatu moral yang akan dipikirkan yaitu mereka bertindak bukan atas dasar jiwa ataupun lahiriyah melainkan mereka bertindak atas anjuran agama.¹⁶ Dengan begitu bisa

¹⁵ A. Charris Zubair, Kuliah Etika (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 13.

¹⁶ Virginia Held, Etika Moral Pembentukan Tindakan Sosial (Jakarta: Erlangga, 1991), 8.

ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang etis tidak cukup disandarkan pada nilai agama serta tradisi saja. Akan tetapi tindakan baik buruk dapat dipelajari dari pesan moral yang diberikan. Belakangan ini banyak filosofi yang tertarik pada minat etika penerapan yang menangani konflik moral bukan menangani teori moral abstrak.

Istilah politik dipakai dalam beragam arti. Dapat mempunyai arti seperangkat hipotesa tentang mekanisme ataupun institusi pemerintahan ataupun juga dapat merujuk pada prinsip - prinsip dan norma - norma moral yang mengontrol perilaku politik. Maka dalam hal ini politik menandai seperangkat gagasan yang terlembagakan yang di perlukan dalam menjabarkan realitas. Selanjutnya politik bisa digunakan untuk tujuan yang beragam seperti:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi - fungsi pemerintahan.
- b. Memberi kepada pemangku keputusan prinsip - prinsip yang menolong mereka untuk mengatasi problematika sosial politik disuatu negara.
- c. Memberikan seperangkat norma - norma dalam memutuskan apa yang secara etis baik dalam kehidupann berpolitik.¹⁷

Upaya agar mendapat pengetahuan yang murni mengenai dasar politik dibutuhkan kajian. Hal ini sesuai dengan penelitian Leo Strauss, yang di dalamnya membagi kajian politik menjadi dua kelompok. Kajian yang pertama mengupas

¹⁷ Henry J Schmandt, "*A History Of Political Philosopy (Terjemahan)*" (Pustaka Pelajar 2002), Hal, 4-5.

tentang organisasi pemerintahan, program, hukum, kekuasaan, kelompok berkementingan, dan kebiasaan sosial. Yang kedua tatanan politik yang baik ataupun jujur secara moral.

Politik memiliki arti sebagai usaha atau memperjuangkan kehidupan yang lebih positif. Politik sebagai usaha menggapai kondisi yang lebih baik untuk masyarakat relevan dengan pernyataan Peter Merkl, usaha menggapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan bagi masyarakat patut diperjuangkan. Memahami persepsi tentang adil dan perubahan yang lebih baik dipengaruhi oleh ideologi serta nilai - nilai yang dipelajari oleh kelompok, masyarakat, maupun negara.

Penjelasan tersebut selaras dengan definisi Rod Hague, yang menyatakan jika politik adalah aktivitas yang berkenaan dengan langkah kelompok menggapai keputusan kolektif serta mengikat melalui usaha mendamaikan perbedaan antar anggota. Pada umumnya politik merupakan usaha dalam menentukan peraturan yang bisa diterima baik oleh sebagian besar penduduk dalam membawa kehidupan masyarakat yang bersama serta harmonis.

Selanjutnya untuk memahami politik juga dapat dilihat dari konsep-konsep politik. Hingga pada perkembangan yang terakhir sekurang kurangnya ada lima pandangan tentang konsep politik. Pertama politik adalah usaha - usaha warga negara yang ditempuh untuk membicarakan serta mewujudkan kebaikan bersama. Kedua politik adalah segala bentuk yang berhubungan dengan pelaksanaan negara serta pemerintahan. Ketiga politik sebagai aktivitas yang diarahkan untuk mencari serta mempertahankan kekuasaan

pada masyarakat. Keempat politik kebijakan umum. Kelima politik sebagai konflik dalam rangka menemukan serta mempertahankan sumber yang dianggap wajib.¹⁸

Pada konteks filsafat, menurut Kattsoff 1986, etika menjelaskan perilaku manusia di pandang dari bentuk baik serta buruk. Etika lebih banyak bersangkut dengan prinsip - prinsip dasar pembenaran dalam kaitan perilaku manusia etika adalah ilmu yang menjelaskan teknik serta alasan kita mendalami suatu jalan tertentu ataupun cara kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral.

Adapun pengertian politik berasal dari kata *politics* yang emmpunyai beragam makna aktivitas pada suatu sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses penentuan tujuan sistem tersebut serta di ikuti dengan pelaksanaannya. Untuk melaksanakan tujuan itu membutuhkan regulasi umum (*public policies*) yang relevan dengan pembagian serta peraturan dari sumber yang tersedia. Politik biasanya relevan dengan tujuan masyarakat dan bukan menjadi tujuan individual.

Dilihat dari substansi, etika politik memiliki pengertian yang tidak bisa dipisah dengan subjek sebagai pelaku, seperti manusia. Dengan begitu, etika politik saling berhubungan dengan pembahasan moral, terutama mengenai keadilan dan kebaikan bersama. Penjelasan ini berdasarkan realitas yang menyangkut moral sebagai subjek etika dalam kehidupan manusia.

¹⁸ Ramlan Surbakti, "*Memahami Ilmu Politik*" (PT Gramedia Widiasmara Indonesia, Jakarta, 1992), Hal 1-2.

Dalam hubungan etika dengan masyarakat, bangsa, ataupun negara, etika politik menempatkan fundamental manusia sebagai fundamental. Dasar ini ditunjukkan untuk menguatkan akar etika politik yang menjembatani kebaikan dengan hakikat manusia dalam beradab serta memiliki budaya. Perihal etika politik, Giradin (2012) menyebut bahwa ada tiga faktor paling dasar dalam etika berpolitik. Ketiganya bisa ditemui kapan dan dimana saja dengan berbagai tingkatan, termasuk dalam sistem autokratis. Ketiga faktor yang menjadi akar dari etika politik, terdiri atas:

a. Pembatasan kekuasaan

Pembatasan kekuasaan secara struktural bisa menolong menangani masalah serta membuat mereka bisa dinegosiasikan. Pembatasan kekuasaan dapat menjadi alat dalam mengawasi aktor - aktor politik memakai kewenangan yang dimiliki dengan tidak seharusnya. Beragam bentuk pembatasan kekuasaan itu bisa kita pandang pada penerapan *good governance* di berbagai Negri, pembagian kekuasaan dari pusat kedaerah, *civil society*, dan pengawasan eksekutif oleh legislatif serta pengawasan keduanya oleh lembaga peradilan independen.

b. Efektivitas

Efisiensi dan efektivitas merupakan beberapa ketentuan dasar dari politik. Efektivitas tidak boleh mengabaikan situasi hidup masyarakat mayoritas ataupun minoritas. Hal ini dikarenakan

efektivitas politik juga membutuhkan kedekatan diantara warga dan menentukan keputusan.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya kekuasaan politik bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang ditetapkan dan dilakukan, di depan seluruh warga Negaranya, parlemen, majelis dewan, kelompok kaya serta berpengaruh, ataupun bahkan kelompok perlawanan.¹⁹

Etika politik dalam kehidupan bermasyarakat memiliki keterbatasan pada alat teoretis yang berfungsi untuk menanyakan dan memaparkan legitimasi politik secara mendasar dan bertanggung jawab tanpa emosi, apriori, serta prasangka. Dengan dasar teoretis tersebut etika politik akan menilai sesuatu secara objektif, rasional, dan argumentatif.

Dalam pelaksanaannya, etika politik tidak turut mencampuri ingar-bingar politik praktis karena etika politik sekadar media yang menolong memecahkan masalah perbedaan pendapat maupun perbedaan ideologi sehingga aktivitas politik berjalan secara objektif. Berdasarkan fungsi, maka etika politik sebagai hukum serta kekuasaan negara, selaku lembaga penataan masyarakat. Berbeda dengan kekuasaan negara, yang menjadi lembaga penata masyarakat sesuai struktur ganda sesuai kemampuan individu dan sosial.

¹⁹*Loc. Cit.*, hal,52-53

Jadi, etika politik perlu diimplementasikan oleh masing-masing orang yang terkait secara nyata dalam realisasi pemerintahan negara tanpa membedakan peran. Siapapun memiliki etika politik yang sama, termasuk pejabat negara, anggota legislatif maupun yudikatif, pejabat eksekutif, penegang hukum, aparat pelaksana, serta masyarakat. Mereka wajib memahami bahwa tidak hanya legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi saja yang patut diperhitungkan di negara, tetapi membawa etika politik sebagai legitimasi moral.

Prinsip dasar etika politik kontemporer yang disusun berdasarkan pengelompokan pancasila

a. Pluralisme

Pluralisme dapat didefinisikan sebagai kesediaan untuk menerima pluralitas. Berarti untuk hidup dengan positif, damai, toleran serta damai bersama warga masyarakat yang berbeda pendapat. Pluralisme mengindikasikan pengakuan terhadap kebebasan agama, menemukan informasi, toleransi, dan kemampuan dalam berpikir. Dalam pluralisme menggunakan prinsip yang mengungkap Ketuhanan Yangmaha Esa, bila Indonesia tidak ada diskriminasi kepada seseorang yang berbeda keyakinan religius. Perilaku itu merupakan bukti peradaban dan kematangan karakter kolektif bangsa.

b. Hak asasi manusia

Hak - hak asasi manusia menyatakan cara manusia diperlakukan serta wajib tidak di perlakukan. Manusia perlu di perlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Hak -

hak asasi manusia bersifat mutlak ataupun kontekstual. Mutlak dikarenakan manusia mempunyainya bukan atas pemberian Negara , ataupun masyarakat melainkan pemberian sang pencipta kepadanya.

c. Solidaritas bangsa

Solidaritas berarti bahwa manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri tetapi juga demi orang lain. Manusia hanya hidup menurut harkatnya yang hanya dibagi dari dirinya sendiri, tetapi juga menyumbang sesuatu pada hidup manusia lainnya. Solidaritas manusia mencakup keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, serta kebangsaan.

d. Demokrasi

Secara mendasar, kedaulatan rakyat di dalamnya tidak ada elit, ideologi, maupun sekelompok agamawan yang berhak memaksa dan memutuskan dengan cara mengancam atas pandangan hidup seseorang. Kedaulatan rakyat, kebebasan berideologi, dan prinsip keterwakilan merupakan bagian dari demokrasi yang dijunjung oleh negara. Dengan demikian, demokrasi membutuhkan sistem penterjemah keinginan masyarakat ke tindakan politik agar bisa berjalan lebih baik berdasarkan pengakuan serta sesuai jaminan HAM.

Pelindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas, bukannya menjadi kediktatoran mayoritas. Kedua kekuasaan dijalankan atas dasar serta dalam ketaatan terhadap hukum Negara. Unsur hakiki adalah kepastian hukum dalam hidup berdampingan dan

relevan dengan konsep demokrasi agar mencegah kesewenangan pemerintah.

e. Keadilan sosial

Dalam kehidupan sehari - hari, keadilan sosial menjadi norma yang mendasar dengan tujuan mencegah masyarakat terpecah menjadi dua bagian, yaitu bagian atas yang terus menerus maju dan bagian bawah yang hanya bisa bertahan dalam kekuasaan golongan atas. Adanya keadilan sosial, siapapun berhak atas kehidupan serta tujuan hidup tanpa pembatasan dari pihak manapun.

Selanjutnya dimensi –dimensi etika politik:

a. Tujuan politik

Dimensi tujuan dirancang dalam menggapai kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada kebebasan serta keadilan. Dalam melawan masalah - masalah Negara, kebijakan umum pemerintah harus ditetapkan dengan jelas dalam prioritas, program, metode serta pendasaran filosofinya.

b. Sarana pencapaian tujuan politik

Dimensi ini melingkupi sistem serta prinsip dasar pengorganisasian praktik pelaksanaan Negara serta institusi- institusi sosial. Hal itu menentukan perilaku masyarakat dalam menghadapi masalah - masalah dasar.

c. Aksi politik

Tindakan politik disebut rasional jika pelaku memiliki orientasi situasi serta pemahaman terhadap permasalahan. Itu mengandaikan kemampuan memersepsi beragam kepentingan yang di pertaruhkan berdasar peta politik yang ada.²⁰

4. Pengertian Sufisme

Menurut Gulen, sufisme meruoakan transformasi atas kehendak individu yang relevan dengan kehendaknya..²¹ Dengan penjelasan tersebut, *sufisme* merupakan kebebasan serta kemurahan hati, serta ketiadaanhambatan pada seseorang. Sesungguhnya, Sang pencipta akan mematikan mereka di dalam diri serta menghidupkannya di dalam diri.

Mengetahui ketidak sempurnaan dunia, berarti buka segala sesuatu yang tidak sempurna serta dalam upaya merenungi serta mengingat Sang Pencipta. Jadi, zat yang jauh dari tidak sempurna disebut sebagai sufisme karena bertujuan menhendalikan bagian tubuh dan menawasi kehidupan. Dengan mempelajari sufisme, seseorang akan menjauhkan apa saja yang ada di kepala serta memberik apa yang ada di tangan, serta tidak mundur dari yang telah dikaruniakan.

Sesuai penjelasan Seyyed Hossein Nasr yang menyebutkan tarekat ataupun jalan spiritual yang biasanya dikenal dengan tasawuf ataupun sufisme adalah dimensi batin ataupun esoterik Islam”. K. H. Syamsuri Badawi menjelaskan jika tasawuf merupakan tasfiyyat al-qalb ‘an sifat al- mazmumat atau penyucian jiwa

²⁰ *Loc. Cit.*,hal,61-63

²¹ Tim Historia, “ *Hamka Ulama Serba Bisa Dalam Sejarah Indonesia*” (PT Kompas Media Nusantara, 2018) Hal, 204

atas sifat tercela manusia. K. H. A. S Shahibulwafa Tajul Arifin yang dikenal dengan sebutan Aban Anom, menyepakati jika sufisme merupakan panduan untuk membersihkan hati dari nafsu dan dampak-dampak nya. Sufisme mengajarkan latihan agar manusia dapat mengatur hawa nafsu mereka, serta dapat mengembangkan watak mulia dan patuh terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW sebaik mungkin.²²

Sufisme merupakan tindakan yang perlu dilalui seorang *sufi* yang hanya dikenal oleh Tuhan semata. Sedangkan dia perlu senantiasa bersama Tuhan, serta dalam rupa dan cara yang hanya dikenal oleh Tuhan semata. Sufisme yaitu; sepenuhnya disiplin diri. *Sufisme* yaitu mempunyai bukan sesuatu, dan diperoleh oleh bukan sesuatu. *Sufisme* bukanlah sesuatu sistem yang tertata atas aturan maupun sains, namun lebih merupakan aturan moral. Dan jika dia merupakan sains, tentunya hanya akan diketahui melalui serangkain instruksi. Namun sebagai arahan, cobalah diperhatikan: Hasililah dirimu dengan akhlak sifat Tuhan serta akhlak Tuhan, tersebut tidak bisa didapatkan hanya melalui serangkaian aturan ataupun sains.

Sebagaimana yang telah dipahami di pesantren, di dalam sufisme mencangkup ajaran perilaku. Mengikuti ajaran sufisme berarti bersedia menjalani ritual mulia, di antaranya ibadah sunah agar bisa menegakkan akhlak yang lebih baik. Akhlak dalam pembelajaran sufisme digunakan sebagai pelengkap terhadap tugas wajib di dalam syariah. Praktik dalam sufisme direpresentasikan sebagai

²² Moh Khasan, "Pesantren, Sufisme Dan Tantangan Modernitas" *Dimas* Vol. 10 No. 1, (2010), hal. 120.

ketaatan atas aturan Islam, baik ritual mulia atau perkara sosial yang berwujud menjalankan ritual sunah sebelum maupun setelah beribadah wajib.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sama sama meneliti mengenai sufisme politik namun memiliki perbedaan seperti yang tercantum dalam table berikut:

Tabel 1.

No	Penulis dan Universitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Meutia Fauziah Universitas Indonesia 2010	METAFORA SUFISME <i>RUBAI'I HAMZAH FANSURI</i>	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang <i>sufisme</i>	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu memaparkan metafora sufisme yang terdapat dalam syair Ruba'i Hamzah Fansuri sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan etika politik <i>Thariqah Qadiriyyah Naqsyabandiyah</i> Suryalaya
2.	Muh. Ilyas Syarifuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2018	SUFISME DAN POLITIK Jami'atul Mubarakh Kota Makassar dengan Elite Politik)	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang sufisme dan politik	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu konsteks studi kasus yang diteliti yaitu Relasi Majelis Zikir Jami'atul Mubarakh Kota Makassar dengan Elite Politik sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan etika politik <i>Thariqah Qadiriyyah</i>

				<i>Naqsyabandiyah</i> Suryalaya
3.	M. Leliyanto Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattulah Jakarta 2010	KONTEKST UALISASI <i>SUFISME</i> DALAM KEMODER NAN DAN KEINDONE SIAAN (Studi Atas Relavansi Pemikiran <i>Sufisme</i> Nurkholis Majid)	Peneliti ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang ajaran <i>sufisme</i>	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu <i>SUFISME</i> DALAMm KEMODERNAN DAN KEINDONESIA AN (Studi Atas Relavansi Pemikiran <i>Sufisme</i> Nurkholis Majid) sedangkan dalam peenelitian ini menjelaskan etika politik dalam <i>Thariqah</i> <i>Qadiriyyah</i> <i>Naqsyabandiyah</i> Suryalaya
4.	Wahyu Nurhadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2015	KOMUNIKA SI SUFISTIK DALAM KAJIAN REALISME MAGIS (Telaah Realisme Magis Wendy B. Faris Terhadap Kumpulan Cerpwn	Persamaan yaitu meneliti tentang ajaran <i>sufisme</i>	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu KOMUNIKASI SUFIKTIK DALAM KAJIAN REALISME MAGIS (Telaah Realisme Magis Wendy B. Faris Terhadap Kumpulan Cerpwn Laksian

		Laksian Kligrafi Karya A Mustofa Bisri)		Kligrafi Karya A Mustofa Bisri) sedangkan dalam peenelitian ini menjelaskan etika politik <i>Thariqah Qadiriyyah Naqsyabandiyah</i> Suryalaya.
--	--	---	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Agar arah dalam penulisan penelitian nya tersusun cerara rapih dan benar dalam rencana penelitian ini penulis membuat kerangka berfikir yaitu akan membahas tentang bagaimana etika politik *Thariqah Qadiriyyah Naqsyabandiyah* Suryalaya. Dengan menggunakan konsep etika politik islam Al-Mawardi sebagai landasan teori penelitian. Dari kerangka pemikiran yang dibuat menjelaskan dimana penelitian ini akan menjelaskan mengenai *sufisme* politik sebagai landasan etika politik yaitu dalam ajaran *Thariqah Qadiriyyah Naqsyabandiyah* Suryalaya sebagai salah satu mahzab *sufisme* yang ada di Indonesia. Dengan cara menjelaskan ajaran inti *Thariqah Qadiriyyah Naqsyabandiyah* Suryalaya kemudian di ambil nilai nilai etika politik dari ajaran inti tersebut setelah itu di analisis mengenai etika pokitik bernegara mengunakan nilai-nilai etika politik islam yaitu Prinsip musyawarah (*syura*) yang tercantum dalam Q.S Al-Imran ayat 159, Prinsip persamaan yang tercantum dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13, Prinsip keadilan yang tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 8, serta Prinsip kebebasan (*al –hurriyah*) yang tercantum dalam Q.S Al-An’am ayat 164. Dari nilai-nilai tersebut akan

berusaha menjelaskan nilai etika dalam ajaran *Thariqah Qadiriyyah Naqsyabandiyah* Suryalaya.

